

PERAN DAN KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMATERA UTARA

M. Umar Maya Putra

Entrepreneurship Development Program

umar_yazli@yahoo.com

Abstrak

Terpeliharanya stabilitas moneter adalah salah satu dimensi stabilitas nasional yang merupakan bagian integral dan sasaran pembangunan nasional. Stabilitas moneter yang mantap mempunyai pengaruh luas terhadap kegiatan perekonomian termasuk diantaranya kegiatan di sektor perbankan. Kebijakan moneter yang pada umumnya menempatkan dua indikator kebijakan moneter penting yakni suku bunga dan uang beredar. Akan tetapi, dalam keseharian perekonomian, hanya indikator suku bunga yang dapat dimonitor secara langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, lazimnya, masyarakat juga dapat melihat dan merasakan beberapa hal penting yang menjadi indikator dari stabilitas moneter.

Sebagai tolak ukur stabilitas moneter diantaranya: a) laju inflasi pada tingkat yang cukup rendah, b) suku bunga pada tingkat wajar, c) nilai tukar rupiah yang realistis, d) ekspektasi masyarakat terhadap moneter. Keempat tolak ukur bisa dilihat sehari-hari dan dirasakan pengaruhnya oleh masyarakat. Perkembangan beberapa tolak ukur stabilitas moneter tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dengan perkembangan kegiatan perbankan yang sehat, baik secara langsung maupun tidak langsung [6].

Keywords: *Perbankan, Moneter, Stabilitas Keuangan*

1. Pendahuluan

Peredaran uang beredar perlu menjadi suatu syarat kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank Central selaku otoritas moneter ketika sampai di masyarakat. Hal ini menjadi suatu pemikiran yang sangat penting untuk bisa otoritas moneter menjaga kestabilan moneter, sehingga terciptanya kondisi perekonomian yang harmonis. Keharmonisan kondisi moneter dalam perekonomian dapat terlihat bagaimana kondisi di dunia usaha tetap bisa menghasilkan output yang tinggi.

Peran dan kebijakan moneter akan berbanding terbaik dengan kebijakan pemerintah. Suatu sisi yang harus menjaga suatu perekonomian agar berjalan dengan baik dan berkesinambungan serta mampu berjalan sesuai dengan arah pembangunan. Suatu kondisi inflasi yang sangat besar, ketika jumlah uang beredar, tentunya stabilitas moneter harus dijaga secara maksimal dengan menyerap uang dari masyarakat dengan mengadakan kebijakan menaikkan tingkat suku bunga agar terserap dana dari masyarakat, sebaliknya ketika keadaan lagi deflasi, kelesuan dari perekonomian, Bank Indonesia, melakukan kebijakan untuk menyebarkan uang di masyarakat, dengan cara menurunkan tingkat suku bunga, agar bergerak sektor riil secara baik. Pentingnya kebijakan moneter ini, merupakan stimulus yang berharga bagi perekonomian.

2. Kajian Pustaka

2.1. Perkembangan Sistem Keuangan

Financial system (sistem keuangan) suatu kaidah ataupun aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana (keuangan) bagi negara dan proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat. Pada abad pertengahan (masa kehadiran islam), islam ini belum ditemukan di negara-negara Eropa, Namun di akhir abad pertengahan, beberapa negara bagian menuntut adanya sistem keuangan bagi negara hingga akhirnya rancangan dari sistem ini pun terbentuk [4].

Perkembangan sistem keuangan ini merupakan suatu hal yang dapat digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat seperti sebagai cara untuk menstabilisasi dalam perekonomian. Dalam hal menghimpun dana masyarakat yang diperlukan suatu kebijakan yang sangat *vital* dalam melihat perkembangan jumlah uang beredar. Perkembangan jumlah uang beredar ini, bukanlah sesuatu hal yang mutlak dalam menggerakkan suatu sendi perekonomian dikarenakan, perlu dilihat perkembangan sektor riil. Sektor riil sangat dominan menentukan pergerakan dari alokasi sistem keuangan sehingga satu sama lain saling mempengaruhi.

2.2. Tolak Ukur Stabilitas Moneter

Tolak ukur stabilitas moneter, diantaranya [6]:

- a. Laju Inflasi
- b. Suku Bunga
- c. Nilai Tukar Mata Uang
- d. Ekspektasi Masyarakat

Tolak ukur stabilitas moneter yang dilihat dari inflasi mendorong Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan sebagai otoritas moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga, agar minat masyarakat untuk menabung tinggi, sehingga kondisi di sektor akan stabil dan tidak terjadi efek kenaikan harga yang tinggi. Kenaikan harga tinggi menyebabkan daya beli akan rendah dan tidak bergairahnya sektor riil sehingga perlu dilakukan stabilisasi dengan menaikkan tingkat suku bunga. Selain menjaga suku bunga, Bank Indonesia perlu menstabilkan dari sisi perubahan nilai tukar rupiah, agar tetap menjaga kestabilan harga-harga di dalam negeri dan faktor penarik bagi luar negeri. Memang ada kalanya nilai tukar rupiah yang rendah, dapat menarik dari sisi daya beli luar negeri dan memberikan dampak positif dalam pembangunan.

2.3. Sistem Perbankan dan Moneter Indonesia

Bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral termasuk dalam sistem moneter. Di Indonesia, yang digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas yaitu Bank Indonesia, dan bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian dari suatu sistem moneter [5].

Fungsi pokok otoritas moneter antara lain:

- a. Mengeluarkan uang kertas dan logam
- b. Menciptakan uang primer
- c. Memelihara cadangan devisa nasional
- d. Mengawasi sistem moneter

Fungsi sistem moneter

- a. Menyeleggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat dan dengan biaya yang relatif kecil.
- b. Melakukan fungsi intermediasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- c. Menjaga kestabilan tingkat bunga melalui kebijakan moneter.

2.4. Peranan Kebijakan Moneter di Negara Berkembang

Tugas kebijakan moneter pada umumnya jauh lebih berat dan rumit jika dibandingkan dengan di negara maju. Ada beberapa faktor menyebabkan hal ini. *Pertama*, tugas untuk menciptakan penawaran uang yang cukup sehingga pertambahannya dapat selalu selaras dengan jalannya pembangunan yang memerlukan disiplin kuat di kalangan penguasa moneter dan juga di pihak pemerintah. Kekurangan modal, dan terbatasnya pendapatan pemerintah sering kali menimbulkan dorongan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk meminjam secara berlebihan pada bank Sentral. Jika ini, dilakukan laju pertumbuhan jumlah uang tunai dan akan menjadi lebih cepat dari yang diperlukan. *Kedua*, Bank sentral di negara berkembang harus lebih teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerimaan valuta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri (ekspor dan impor). Kegiatan di sektor ini sangat mudah menimbulkan inflasi negara tersebut, karena harga mentah yang diekspor selalu naik turun. Maka, penerimaan dari kegiatan ekspor selalu mengalami perubahan yang tidak teratur. Adakalanya tingkat kenaikan yang besar sekali, dan ada kalanya sangat merosot, akibat dari naik turunnya pendapatan ekspor kepada ketahanan ekonomi dan kelancaran pembangunan [9].

Dengan meningkatkan ketelitian dari kebijakan moneter yang lebih berhati-hati terhadap pengeluaran uang dalam negeri dan perdagangan luar negeri, ketahanan jumlah uang beredar akan lebih terarah dan akan menjadi penyeimbang dalam kebijakan yang dilakukan untuk pengeluaran pemerintah yang dapat disebut dengan kebijakan fiskal. Efektivitas kebijakan moneter yang dapat terlihat bagaimana mengembangkan sektor pedesaan dengan baik untuk menyalurkan ke dalam unit yang membutuhkan. Berkaitan dengan lembaga ekonomi, terkandung konsep mengenai pasar desa dan kemudian konsep modern mengenai agropolitan, kota pertanian sebagai pusat perdagangan dan pelayanan jasa masyarakat pertanian. Lembaga pasar dan agropolitan ini memfasilitasi proses terbentuknya pasar dan ekonomi pasar. Perdagangan dan jasa membutuhkan alat pembayaran yaitu uang. Karena itu, perkembangan pasar ikut menumbuhkan proses monetisasi pedesaan. Di daerah pedesaan, bank akan memiliki corak tersendiri yang diwarnai oleh perilaku masyarakat pedesaan. Karena itu, kemudian timbul konsep, mengenai Bank Pedesaan (*rural bank*) sebagai lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Di Indonesia, Bank rakyat Indonesia (BRI) merupakan model bank pedesaan dengan ciri BRI Unit desanya yang berhasil memfasilitasi proses monetisasi pedesaan [7].

Untuk negara berkembang, diperlukan suatu kerjasama dengan setiap Bank Umum agar mampu sebagai Bank yang dapat memberikan pinjaman selaras dengan kebijakan pemerintah untuk membantu permodalan pada UMKM. Namun prinsip penggunaan modal yang diberikan kepada UMKM, diperlukan perhatian yang selektif agar bisa menjadi cara untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Terhadap lembaga asing, juga diperlukan suatu kehati-hatian dalam melakukan seleksi, agar terjadinya profesionalisme dalam tindakan yang bersifat kebijakan moneter.

2.5. Peranan Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan

Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah [2]:

Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. *Kedua*, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan.

Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. *Keempat*, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara *macroprudential*, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. *Kelima*, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR).

Dengan demikian, Bank Indonesia sangat berperan dalam menjalankan kebijakan moneter secara makro prudential dengan instrumen yang telah ada. Bank Indonesia akan menjalankan suatu kebijakan untuk melihat bagaimana proses kebijakan moneter bisa terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan suatu permasalahan secara makro ekonomi. Namun banyak permasalahan yang timbul sebagai dampak dari persoalan mikro ekonomi seperti asuransi yang sangat berpengaruh dengan perekonomian dan sebagai control yang lebih jelas, dibuatlah lembaga yang memantau kebijakan moneter dengan fungsi mikro prudential yang sudah dibentuk yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan [1] :

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

Dengan berkolaborasinya Bank Indonesia dan Otoritas jasa keuangan, tentunya akan memudahkan tugas dalam mengawasi segala permasalahan hingga ke bagian yang terkecil. Masyarakat juga lebih dimudahkan dalam memberikan pertanyaan dan bisa diselesaikan segala permasalahan keuangan hingga ke bagian yang terkecil. Saat ini, efektifitas kedua lembaga ini, sangat mampu untuk membantu hingga pada lapisan terkecil baik kabupaten dan kota. Namun untuk menjangkau hingga ke pelosok daerah secara *significant*, masih diperlukan sosialisasi secara lebih intensif. Dengan dilakukan sosialisasi secara intensif, maka akan membuat masyarakat dapat optimal mengendalikan sistem keuangan.

2.6. Esensi Kebijakan Moneter dalam Pembangunan

Bank Sentral adalah lembaga yang melaksanakan pengendalian moneter dengan melakukan serangkaian kebijakan moneter. Yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter bertujuan untuk mengawasi dan mempengaruhi kestabilan, kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Sentral berupa kebijakan kuantitatif dan kualitatif [3].

1. Kebijakan Kuantitatif

- a. Open Market Operation (menjual atau membeli surat berharga)

Bank Sentral melakukan jual beli surat-surat berharga untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Jika terjadi kelebihan uang beredar, Bank Sentral mengambil kebijakan moneter dengan menjual SBI (Sertifikat Bank Indonesia), sehingga sebagian uang masyarakat yang beredar dapat ditarik. Sebaliknya, bila perekonomian kekurangan jumlah uang

beredar, untuk mendorong perekonomian pemerintah membeli SBI. Dalam penerapannya dapat disebutkan:

Menjual SBI ----- JUB berkurang

Membeli SBI ----- JUB bertambah

b. Reserve Requirement (Mempengaruhi cadangan minimum)

Bank Indonesia menetapkan dana cadangan tetap bank umum pada Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat membuat perubahan atas tingkat cadangan minimum yang harus disimpan bank umum. Seandainya Bank Sentral menganggap bahwa jumlah uang beredar sudah terlalu banyak, bank umum telah berlebihan dalam menyalurkan kreditnya maka bank sentral dapat menaikkan cadangan wajibnya, demikian pula sebaliknya. Dengan adanya kenaikan cadangan wajib, akan mengurangi ekspansi kredit.

Cadangan minimum naik ----- JUB berkurang

Cadangan minimum turun ----- JUB bertambah

c. The Discount Rate (Mempengaruhi tingkat bunga diskonto)

Bank Indonesia dapat merubah, menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mempengaruhi peredaran uang. Bila permintaan uang meningkat, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga pinjaman yang berakibat mengurangi permintaan kredit dan memperbesar juga uang beredar dan sebaliknya.

Tingkat diskonto naik ----- JUB berkurang

Tingkat diskonto turun ----- JUB bertambah

2. Kebijakan Kualitatif

a. Selective Credit Control (Pengawasan terhadap kredit)

Pemberian kredit pada sektor produktif. Yang diawasi adalah corak pinjaman dan bentuk investasi yang dilakukan Bank Umum.

b. Moral Suasion

Bank Sentral dapat melakukan himbauan menggunakan tulisan atau lisan berupa ajakan untuk untuk melakukan atau tidak suatu tindakan tertentu. Misalnya, Bank Indonesia mengajak bank-bank nasional maupun Bank Asing mengusahakan penurunan tingkat bunga.

Dengan perlambatan kondisi perekonomian Indonesia yang juga selaras dengan perlambatan dari perekonomian Tiongkok mengakibatkan. Bank Indonesia memerlukan beberapa hal dari kebijakan kuantitatif yaitu Membeli SBI, Cadangan minimum turun dan Tingkat diskonto turun sehingga bisa menambah jumlah uang beredar, agar dapat meningkatkan semangat bagi sektor riil dalam meningkatkan usaha sekaligus untuk menstabilkan perekonomian. Namun untuk kebijakan moneter kualitatif harus memperhatikan corak pinjaman yang dikucurkan secara selectif sehingga tidak terjadi kredit macet dan diperlukan suatu moral suasion secara khusus bagi bank umum lainnya dalam hal memberikan kredit selektif sekaligus mampu menurunkan suku bunga secara menyeluruh.

3. Metode Penelitian

3.1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam pembuatan makalah Peran dan kebijakan Moneter dalam Perekonomian Propinsi Sumatera Utara menggunakan Sumber Sekunder. Sumber Sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dokumen yang dihasilkan bisa melalui Data BPS dan Data dari website www.bi.go.id yang memiliki data terstruktur untuk membuat hasil yang efektif dalam penentuan kebijakan [8].

3.2. Analisis Data

Analisis data yang akan diambil dengan menggunakan Statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasinya. Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Efektivitas Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Nasional

Dari sisi global, pemulihan ekonomi dunia terus berlanjut, meskipun berjalan tidak seimbang. Pemulihan ekonomi global masih ditopang oleh perekonomian Amerika Serikat yang terus membaik. Hal itu tercermin dari indikator produksi yang meningkat dan tingkat pengangguran yang menurun. Perkembangan AS ini semakin memperkuat prakiraan terjadinya normalisasi kebijakan The Fed pada pertengahan 2015. Sementara itu, perekonomian Eropa dan Jepang mengalami perlambatan. Perekonomian Tiongkok juga mengindikasikan kecenderungan yang melambat. Dengan perkembangan tersebut, harga komoditas global masih cenderung menurun, termasuk penurunan harga minyak dunia seiring dengan meningkatnya pasokan di tengah melemahnya permintaan. Dari jalur perdagangan, perkembangan ekonomi global tersebut akan berpengaruh pada kinerja ekspor Indonesia, dengan terus membaiknya ekspor manufaktur di tengah masih tertahannya ekspor komoditas primer. Sementara dari jalur keuangan, arus masuk modal asing ke Indonesia diperkirakan masih akan terus berlangsung meskipun dengan volatilitas yang masih cukup tinggi sehubungan dengan normalisasi kebijakan the Fed. Bank Indonesia akan terus mewaspadaai berbagai risiko eksternal tersebut agar tetap kondusif bagi perekonomian Indonesia [2].

Seiring dengan masih lemahnya permintaan global, pertumbuhan ekonomi domestik masih dalam kecenderungan melambat. Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2014 tercatat 5,01% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2014 sebesar 5,12% (yoy). Konsumsi meningkat ditopang oleh masih kuatnya konsumsi swasta dan meningkatnya belanja barang Pemerintah. Sementara itu, kegiatan investasi, khususnya investasi nonbangunan, masih lemah. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor masih mengalami kontraksi, terutama bersumber dari melemahnya ekspor komoditas primer, sementara ekspor manufaktur secara konsisten terus membaik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi regional, dimana sumber perlambatan disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi Sumatera sebagai wilayah pengekspor komoditas. Sementara, pertumbuhan ekonomi di wilayah KTI mengalami peningkatan sejalan dengan kembali diekspornya mineral dan pertumbuhan kawasan Jawa relatif tinggi sejalan dengan terus membaiknya ekspor manufaktur. Secara keseluruhan tahun 2014, pertumbuhan diperkirakan mendekati batas bawah kisaran 5,1-5,5%, dan akan meningkat pada kisaran 5,4-5,8% pada 2015.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) membaik pada triwulan III 2014, terutama didukung oleh defisit transaksi berjalan yang menurun. Defisit transaksi berjalan pada triwulan III 2014 mencapai 6,836 miliar dolar AS (3,07% dari PDB), menurun dari defisit pada triwulan II 2014 sebesar 8,689 miliar dolar AS (4,07% dari PDB) dan triwulan III 2013 sebesar 8,635 miliar dolar AS (3,89% dari PDB). Perbaikan transaksi berjalan terutama didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan nonmigas sejalan dengan penurunan impor sebagai hasil kebijakan stabilisasi ekonomi yang ditempuh selama ini, ditengah defisit neraca migas yang masih meningkat.

Rupiah mengalami pelemahan disebabkan sentimen global. Pada triwulan III 2014, rupiah secara rata-rata melemah sebesar 1,2% (qtq) ke level Rp11.770 per dolar AS. Tekanan

terhadap rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu kekhawatiran terhadap normalisasi kebijakan The Fed, dinamika geopolitik, dan perlambatan ekonomi global. Sementara dari faktor internal, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh perilaku investor yang menunggu pembentukan kabinet baru dan program kerja pemerintah ke depan. Tekanan terhadap rupiah juga berlanjut di bulan Oktober 2014. Rupiah secara rata-rata melemah 2,01% (mtm) ke level Rp12.142 per dolar AS. Ke depan, Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya.

Inflasi terjaga dan berada dalam tren yang menurun sehingga mendukung prospek pencapaian sasaran inflasi 2014 yakni $4,5 \pm 1\%$. Inflasi triwulan III 2014 tercatat 4,53% (yoy), menurun dibandingkan 6,70% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Inflasi yang tetap terjaga tersebut didukung oleh inflasi inti dan volatile food yang terkendali. Terkendalinya Inflasi inti didukung oleh penurunan harga komoditas global, permintaan yang moderat dan ekspektasi inflasi yang terjaga. Sementara itu, inflasi volatile food juga tercatat relatif rendah, seiring dengan tercukupinya pasokan pangan. Sebaliknya, inflasi administered prices meningkat terutama didorong oleh kenaikan TTL RT dan LPG 12 kg. Inflasi yang terkendali berlanjut pada bulan Oktober 2014, meskipun mencatat kenaikan menjadi 4,83% (yoy).

4.2. Peran dan Kebijakan Moneter dalam mempengaruhi Perekonomian di Provinsi Sumatera Utara

Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan II-2014 tumbuh sebesar 5,5% (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I-2014 sebesar 5,6% (yoy). Dari sisi permintaan, relatif melambatnya pertumbuhan didorong oleh perlambatan pada pertumbuhan konsumsi pemerintah dan ekspor. Dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh melambatnya sektor sekunder dan tersier seperti industri pengolahan dan sektor angkutan & komunikasi. Sementara itu, penggerak utama perekonomian Sumatera Utara pada triwulan laporan diantaranya berasal dari sektor pertanian, dan sektor perdagangan, hotel & restoran (PHR).

Dengan berkembangnya sektor pertanian dan perdagangan, merupakan suatu basis yang dapat dikembangkan agar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal, namun masih juga harus dipikirkan, bagaimana meningkatkan sektor ini dan dapat berjalan dengan maksimal, diperlukan suatu kebijakan yang bagus di sektor riil dan juga peran lembaga keuangan dalam mengakomodasi modal yang diperlukan dan dapat menjadi suatu pemikiran jika terjadi inflasi, penekanan dari suku bunga untuk bisa menstabilkan harga-harga di masyarakat.

Penurunan tekanan inflasi Provinsi Sumatera Utara terus berlanjut. Pada triwulan II 2014, Provinsi Sumatera Utara mengalami inflasi yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 7,69% (yoy) menjadi 6,17% (yoy). Angka tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi Nasional yang sebesar 7,70% (yoy), seiring dengan tercukupinya pasokan pangan, stabilnya inflasi inti (core inflation), serta suksesnya gerakan pengendalian inflasi oleh TPID Provinsi dan TPID Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.

TPID (Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah) sebagai bentukan dari Bank Indonesia dan pemerintah Sumatera Utara, sukses mengambil langkah dari 7,69% (yoy) menjadi 6,17% (yoy). Hal ini dilakukan dengan penyesuaian dari tingkat suku bunga serta penyesuaian harga-harga kebutuhan pokok yang lebih rentan terkena dampak inflasi.

Krisis listrik yang terjadi di Sumatera Utara diperkirakan akan berdampak pada inflasi Sumatera Utara. Konsumsi listrik yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah belum mampu diikuti oleh ketersediaan pasokan listrik dari PLN. Apabila pertumbuhan ekonomi mencapai 5-7% (yoy), secara rata-rata konsumsi listrik diperkirakan akan tumbuh sebesar 10% per tahun. Hingga akhir Juni 2014, kapasitas listrik Sumut mengalami defisit sekitar 321 MW karena kapasitas terpasang hanya sebesar 1164 MW, belum mampu memenuhi

beban puncak penggunaan sebesar 1.486 MW. Hal tersebut diakui oleh perusahaan pada saat liaison menambah beban biaya energi yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan inflasi dari barang-barang.

Kinerja Perbankan Sumatera Utara pada triwulan II 2014 tumbuh melambat seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari total aset dan penyaluran kredit perbankan di Sumatera Utara yang tumbuh melambat, serta Loan to Deposit Ratio (LDR) yang menurun menjadi 95,47% dan meningkatnya rasio *Non Performing Loans* (NPL) kredit menjadi 2,52%.

Dengan demikian kian, dapat terlihat bahwa kebijakan moneter juga sangat berperan terhadap pertumbuhan sektor riil. Kebijakan moneter ini memang sangat efektif untuk meredam beberapa reaksi dari pasar. Dengan melemahnya sektor riil, Bank Indonesia yang memiliki peran di sektor riil, secara perlahan akan menurunkan suku bunga untuk meningkatkan daya kreasi dan daya saing di sektor riil sehingga mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Kenaikan BBM juga perlu beberapa langkah di sektor moneter untuk mengantisipasi agar tidak terjebak dengan *hyper* inflasi dan juga melemahnya daya beli.

Mencermati perkembangan indikator ekonomi, perekonomian Sumatera Utara pada triwulan III-2014 diperkirakan relatif stabil dengan kecenderungan menurun jika dibandingkan triwulan II 2014. Perlambatan pertumbuhan konsumsi yang masih berlanjut dari sisi permintaan, dan perlambatan pertumbuhan pada 2 dari 3 sektor utama yaitu sektor pertanian, dan industri pengolahan pada sisi penawaran menjadi faktor penyebab perlambatan pertumbuhan. Sementara itu, penurunan laju inflasi pada triwulan III- 2014 diperkirakan masih akan terus berlanjut di triwulan mendatang walaupun dibayangi risiko kenaikan harga pada kelompok *administered prices*. Penurunan tekanan inflasi diperkirakan akan terus berlanjut hingga triwulan mendatang dan diperkirakan berada pada kisaran 4,9%-5,3%.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Efektifitas Kebijakan Moneter dalam perekonomian nasional untuk kebijakan stabilisasi ekonomi yang ditempuh selama ini mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung proses penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih seimbang. Bank Indonesia akan memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung penguatan struktur perekonomian domestik. Selain itu, koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan diintensifkan dalam mengendalikan inflasi dan defisit transaksi berjalan, agar penyesuaian ekonomi tetap terkendali dan mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) membaik pada triwulan III 2014, terutama didukung oleh defisit transaksi berjalan yang menurun. Defisit transaksi berjalan pada triwulan III 2014 mencapai 6,836 miliar dolar AS (3,07% dari PDB), menurun dari defisit pada triwulan II 2014 sebesar 8,689 miliar dolar AS (4,07% dari PDB) dan triwulan III 2013 sebesar 8,635 miliar dolar AS (3,89% dari PDB). Rupiah secara rata-rata melemah 2,01% (mtm) ke level Rp12.142 per dolar AS. Ke depan, Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya. Dengan melemahnya Rupiah, dituntut Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter dalam penentuan kebijakan.

Peran dan kebijakan moneter dalam mempengaruhi perekonomian di Propinsi Sumatera Utara dapat terlihat penurunan tekanan inflasi Provinsi Sumatera Utara terus berlanjut. Pada triwulan II 2014, Provinsi Sumatera Utara mengalami inflasi yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 7,69% (yoy) menjadi 6,17% (yoy). Angka tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi Nasional yang sebesar 7,70% (yoy), seiring dengan

tercukupinya pasokan pangan, stabilnya inflasi inti (core inflation), serta suksesnya gerakan pengendalian inflasi oleh TPID Provinsi dan TPID Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.

Kinerja Perbankan Sumatera Utara pada triwulan II 2014 tumbuh melambat seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari total aset dan penyaluran kredit perbankan di Sumatera Utara yang tumbuh melambat, serta Loan to Deposit Ratio (LDR) yang menurun menjadi 95,47% dan meningkatnya rasio Non Performing Loans (NPL) kredit menjadi 2,52%. Penurunan laju inflasi pada triwulan III- 2014 diperkirakan masih akan terus berlanjut di triwulan mendatang walaupun dibayangi risiko kenaikan harga pada kelompok administered prices. Penurunan tekanan inflasi diperkirakan akan terus berlanjut hingga triwulan mendatang dan diperkirakan berada pada kisaran 4,9%-5,3%.

5.2. Saran

1. Penyesuaian kebijakan makroprudensial juga perlu bekerjasama dengan mikro prudential yang dipegang oleh OJK guna memperluas sumber-sumber pendanaan bagi perbankan sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan dan permasalahan secara mikro serta mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif yang prioritas.
2. Penguatan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung kelancaran dan perluasan penyaluran program-program bantuan dari Pemerintah kepada masyarakat guna mengurangi dampak kenaikan harga BBM melalui penggunaan uang elektronik dan implementasi Layanan Keuangan Digital (LKD) perlu ditingkatkan dan dievaluasi baik BI dan OJK agar dapat melihat *track record* yang positif di dalam perjalanannya
3. Stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai kondisi fundamentalnya perlu dibenahi khususnya di Sumatera Utara dapat terlihat bagaimana efisiensi kegiatan sebagai masukan kepada pusat dari bauran kebijakan
4. Langkah koordinasi bersama Pemerintah baik Pusat maupun Sumatera Utara dengan fokus pada upaya untuk meminimalkan potensi tekanan inflasi khususnya dari sisi kenaikan tarif angkutan dan terjaganya harga pangan. Penguatan koordinasi juga diintensifkan untuk peningkatan stimulus fiskal ke sektor produktif dan kebijakan reformasi struktural lanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Referensi

- [1] <http://www.ojk.go.id>, (n.d.), *tugas-dan-fungsi*, Retrieved November 14, 2014.
- [2] <http://www.bi.go.id>, (n.d.), *Peran BI*, Retrieved November 14, 2014.
- [3] Kunangwangsih, T. P., and A. P., (2007), *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.
- [4] Marthon, S. S., (2007), *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Zikrul Hakim, Jakarta.
- [5] Nurastuti, W., (2011), *Teknologi Perbankan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [6] Pohan, A., (2008). *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- [7] Rahardjo, D., (2011). *Nalar Ekonomi Politik Indonesia*, IPB Press, Bogor.
- [8] Sugiyono., (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung.
- [9] Sukirno, S., (2011). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Prenada Media Group, Jakarta.